

RESENSI BUKU

Susan Blackburn, *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta, 2007, xviii + 256 hlm. ISBN 979-461-507-2. Harga: Rp63.750,00 (soft cover).



Thera Widyastuti

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
therabega2002@yahoo.com

Susan Blackburn adalah Profesor di Universitas Monash, Melbourne Australia yang mempunyai minat pada masalah sosial politik Asia Tenggara khususnya Indonesia. Pada tahun 1993, ia menemukan salinan dari laporan-laporan mengenai Kongres Perempuan Pertama di Perpustakaan Nasional Jakarta. Ia merasa terpanggil untuk menerbitkan ulang isi dari edisi perdana majalah *Isteri* yang memuat

pidato-pidato Kongres Perempuan Pertama pada tanggal 22 Desember 1928. Kedudukan perempuan di tengah masyarakat, pada masa itu, belum setara karena dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat kuat. Sistem patriarki tradisional yang dianut oleh hampir sebagian besar bangsa Indonesia (kecuali suku Minang, Bugis, dan Makassar), pada masa itu membuat ruang gerak kaum perempuan terbatas.

Kongres Perempuan Pertama diselenggarakan di Mataram Yogyakarta. Gagasan penyelenggaraan kongres tersebut adalah untuk membangunkan kesadaran kaum perempuan di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan meningkatkan keberhasilan kaum perempuan meneruskan apa yang sudah dicapai oleh pendahulu mereka. Kongres tersebut digagas oleh tiga orang perempuan Indonesia, yaitu Soejatin, Nyi Hadjar Dewantoro, dan R.A. Soekonto. Semangat ketiga perempuan pencetus kongres tersebut memperlihatkan nasionalisme yang tinggi dalam mendukung perjuangan pergerakan nasionalisme Indonesia (hlm. xiii). Pentingnya kongres tersebut terlihat dengan disepakatinya tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu, bahkan pada tahun 1950, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Besar Nasional (hlm. xii).

Dalam kongres tersebut hadir limabelas pembicara yang berasal dari sepuluh organisasi yang berbeda. Hampir sebagian besar adalah organisasi yang sudah sangat mapan dan terkenal pada masa itu. Peserta kongres adalah utusan dari 23 organisasi yang berlandaskan agama Islam, Katolik, dan non-agama. Meskipun mayoritas pembicara dalam kongres itu berasal dari "Jawa Sentris", ada satu orang pembicara berasal dari Sumatera (Tabel 1, hlm. xxv). Keanekaragaman organisasi yang terlibat dalam kongres tersebut memperlihatkan bahwa semangat berorganisasi kaum perempuan pada saat itu sudah sangat tinggi.

Buku ini secara cukup terperinci menjelaskan aspek-aspek kesetaraan gender dan pemahaman cara pandang kaum perempuan tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Teks-teks pidato setiap pembicara kongres yang dibacakan pada saat berlangsungnya kongres juga terlampir terperinci (hlm. xxxv). Topik-topik yang diangkat meliputi masalah domestik, seperti perkawinan, poligami, westernisasi, dan pendidikan. Beberapa judul pidato di dalam kongres tersebut, antara lain, "Kewadajiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia", "Deradjat Perempoean", "Doedoeknja Perempoean di Kehidoepan Sama-sama", "Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini dan Bagaimanakah Kelak?".

Pidato "Kewadajiban dan Tjita-tjita Poeteri Indonesia" disampaikan oleh Sdr. Sitti Soendari. Dalam pidatonya ia tidak menggunakan bahasa Belanda atau bahasa Jawa, melainkan bahasa Indonesia (ada juga pembicara yang menggunakan bahasa Jawa dalam berpidato). Menurut Sitti Soendari, ini dilakukannya untuk mendukung Kongres Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928) yang dicanangkan di Jakarta beberapa bulan sebelumnya. Ia mengingatkan hadirin mengenai keputusan Kongres Sumpah Pemuda tersebut, yaitu hendak berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, hendak bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, dan hendak menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berikut salah satu kutipan pidato tersebut.

Kalau kita kaum perempuan tahu kewajiban kita, kalau para isteri tidak melupakan kewajiban sebagai isteri, kalau putri mengenali kewajiban putri, barulah tumbuh hak kaum ibu yang sesungguhnya. Hak ini bertopang pada pengakuan kaum perempuan sendiri dan bersendi pada kewajiban yang jelas bagi laki-laki dan perempuan. (hlm. 182).

Pidato tersebut cukup panjang dan sangat berani mengkritik isu gender yang sebelumnya tidak pernah diangkat ke permukaan secara terbuka. Peran perempuan dalam rumah tangga dan masyarakat turut dibahas, terutama bagaimana perempuan menghargai dirinya sendiri, mengembangkan potensi yang dimilikinya, dan membina keluarga yang harmonis.

Pidato "Bagaimanakah Djalan Kaoem Perempoean Waktoe Ini dan Bagaimanakah Kelak?" yang disampaikan oleh Tien Sastrowirjo membahas cara pandang kaum perempuan, baik mengenai kebebasan perempuan untuk mengemukakan pendapat dan penghargaan yang diberikan kepada mereka

atas keberhasilan yang telah mereka capai dengan susah payah. Berikut salah satu kutipan pidato tersebut.

"Kamu perempuan, apa yang kamu lakukan?"

"Kaum laki-laki menjadi apa pun pasti panjang langkahnya, tetapi perempuan selamanya ribut saja karena kainnya".

"Walaupun bisa apapun juga, perempuan toh harus masuk dapur".

"Kalau sudah bisa masak, itu sudah cukup bagi perempuan".

"Semua ini menunjukkan bahwa ia tak senang bekerja sama, bahwa ia tidak setuju kalau kita maju, kalau kita masuk sekolah tinggi dan lain-lainnya". (hlm.195).

Isu kesetaraan gender terutama mengenai hak dan kewajiban kaum perempuan yang dirasakannya sangat tidak adil diangkat oleh pembicara, juga mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat, khususnya suku bangsa Jawa, yang dianggap memihak laki-laki. Keadilan dalam hak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki juga disoroti. Perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi diharapkan dapat mendidik generasi penerus bangsa jauh lebih baik daripada perempuan berpendidikan rendah. Dikemukakan pula tujuh ilmu yang harus dihargai tinggi oleh kaum perempuan untuk memenuhi kewajiban, yaitu: (1) mengurus rumah tangga, (2) pengetahuan untuk mengurus anak, (3) memelihara dan mendidik anak, (4) pendidikan kewarganegaraan, (5) ilmu etika, (6) pengetahuan umum, dan (7) kebutuhan kaum perempuan. Apabila ketujuh ilmu tersebut sudah dikuasai perempuan, maka manfaat dan hasilnya dapat membantu perempuan untuk membangun rumah tangga ideal dan kelak bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, kuat, teguh, berani, pandai, dan maju. Bangsa lain mau berteman, menjadi sahabat, akhirnya tanah tumpah darah Indonesia menjadi termasyhur.

Ketertarikan perempuan berbicara di depan umum mengenai masalah mereka merupakan dampak dari emansipasi perempuan yang mulai berkembang di Pulau Jawa. Banyak perempuan yang sudah menyadari bahwa selain kewajiban, mereka juga memiliki hak yang harus diperjuangkan. Mereka sadar bahwa sudah saatnya kaum perempuan memikirkan diri mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk membangun bangsa, diperlukan pilar yang kokoh dan kaum perempuan dapat menyiapkan pilar yang kokoh tersebut dengan mendidik generasi penerus bangsa sebaik mungkin.

Kongres Perempuan Pertama menjadi cambuk bagi perempuan di Indonesia untuk lebih bergiat memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pengaruh barat sedikit banyak telah memengaruhi pandangan hidup bangsa Indonesia dan turut memberi dampak yang cukup signifikan bagi perjuangan kaum feminis. Perlu diketahui bahwa mayoritas peserta kongres yang berjumlah sekitar 1.000 orang adalah kaum perempuan yang berasal dari golongan bangsawan, berumur muda (berusia sekitar duapuluh), dan mengenyam pendidikan formal modern di barat, baik itu di Belanda maupun Perancis, yaitu negeri-negeri yang

feminismenya sudah sangat berkembang. Pengaruh gelombang feminisme pertama di Eropa tanpa disadari telah masuk ke Indonesia. Keberanian kaum perempuan Indonesia untuk mengungkapkan permasalahan dan mencari solusi terbaik untuk diri mereka merupakan sebuah langkah maju.

Bangsa Indonesia yang masih dipengaruhi tradisi dan norma-norma “timur” perlu mengkaji ulang pengaruh-pengaruh barat yang masuk ke Indonesia. Nilai-nilai “timur” yang memang patut dilestarikan harus dipertahankan agar anak cucu kita dapat mengetahui akar keberadaan mereka. Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan mutu generasi penerus bangsa.

Kehadiran buku ini sangat penting dan perlu disambut dengan semangat tinggi sehingga dapat melanjutkan perjuangan aktivis-aktivis perempuan di tahun 1920-an yang sudah mengawali pergerakan emansipasi perempuan di Indonesia. Gagasan mereka sangat mulia dan berharga untuk seluruh bangsa Indonesia.

Setelah pembaca menyelesaikan membaca buku ini diharapkan ada tertinggal semangat untuk terus berjuang memajukan bangsa. Sudah saatnya untuk melangkah lebih jauh mengejar ketertinggalan dengan negara-negara Asia lainnya dalam mengantisipasi kemajuan di segala bidang.

Xu Ziliang dan Wu Renfu. 实用对外汉语教学法 (*Metode praktis bagi pengajaran bahasa cina sebagai bahasa asing*). Beijing: Peking University Press, 2005, 228 hlm. ISBN 7-301-08092-1. Harga: RMB 22.00 (soft cover).



Lilysagita Tjahjadi

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia
lilysagita_t@yahoo.com

Banyak orang ingin mengantisipasi peran aktif Cina dalam era globalisasi dengan mulai membuka diri untuk mempelajari bahasa Cina. Namun, banyak pelajar yang merasa bahwa bahasa Cina amatlah sulit dipelajari, sehingga pelajar hanya bersemangat di awal pembelajaran saja. Agar pengajaran dapat efektif dan tidak menimbulkan kejenuhan pada pelajar bahasa Cina tersebut, pengajar perlu mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua atau bahasa asing. Pengajaran bahasa Cina sebagai bahasa kedua atau pengajaran bahasa asing mempunyai prinsip pengajaran yang berbeda dengan pengajaran bahasa pertama. Pengajaran bahasa pertama menekankan keterampilan Membaca dan Menulis, mengabaikan keterampilan